SKRIPSI

FLYPAPER EFFECT PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMBAR

Oleh

WINDA DWI ROSYADI
1107579/2011

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2016

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

***FLYPAPER EFFECT* PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA DAERAH**

(*Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumbar 2010 – 2013*)

Nama	**: Winda Dwi Rosyadi**
NIM/TM	**: 1107579/2011**
Program Studi	**: Akuntansi**
Keahlian	**: Akuntansi Sektor Publik**
Fakultas	**: Ekonomi**

Padang, 4 Februari 2016

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Nurzi Sebrina, SE, M. Sc, Ak	**Salma Taqwa S.E, M.Si**
NIP. 19720910 199802 2 003	**NIP. 19730723 200604 2 001**

Mengetahui

Ketua Prodi Studi Akuntansi

Fefri Indra Arza, SE, Akt, M.Sc
NIP. 19730213 199903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang

Judul : ***Flypaper Effect*** **Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah (*Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumbar 2010 – 2013*)**

Nama : **Winda Dwi Rosyadi**

TM/NIM : **2011/1107579**

Program Studi : **Akuntansi**

Fakultas : **Ekonomi**

Padang, 4 Februari 2016

Tim Penguji

	Nama	**Tanda Tangan**
1. Ketua	**: Nurzi Sebrina, SE, M. Sc, Ak**	**1.....**
2. Sekretaris	**: Salma Taqwa, S.E, M.Si**	**2.....**
3. Anggota	**: Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si,Ak**	**3.....**
4. Anggota	**: Nayang Helmayunita, SE,M.Sc**	**4.....**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Winda Dwi Rosyadi
NIM/Thn. Masuk	: 1107579/2011
Tempat/Tgl Lahir	: Padang / 8 Januari 1993
Program Studi	: Akuntansi
Keahlian	: Akuntansi Sektor Publik
Fakultas	: Ekonomi
Alamat	: Jln Hidayah III No 1 Dadok Tunggul Hitam
No. HP/Telp	: 0812-7738-2546
Judul Skripsi	: *Flypaper Effect* Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah (*Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumbar 2010 – 2013*)

Dengan ini meyatakan bahwa:

1. Karya tulis/skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini merupakan gagasan, rumusan, dan penilaian saya sendiri, tanpa bantuan lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya/pendapat yang telah ditulis/dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang, dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah, apabila telah ditandatangani **Asli** oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji dan Ketua Program Studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **Sanksi Akademik** berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Padang, 4 Februari 2016
Yang menyatakan,

Winda Dwi Rosyadi
NIM. 2011/ 1107579

ABSTRAK

Winda Dwi Rosyadi, 1107579/2011. *Flypaper Effect* pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumbar

Pembimbing : 1. Nurzi Sebrina, SE, M.Sc, Ak
2. Salma Taqwa S.E, M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk menguji: (1) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah, (2) Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah, (3) Kemungkinan terjadinya *Flypaper Effect* pada pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Daerah. Penelitian ini tergolong penelitian kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2010-2013. Sedangkan sampel penelitian ini tidak mencapai 30 maka metode yang digunkan adalah seluruh populasi dijadikan sampel (*total sampling)*. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari situs *www.djpk.depkeu.go.id*. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi sederhana dan berganda.

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah (BD), (2) Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah (BD), (3) Telah terjadi *flypaper effect* terhadap belanja daerah.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, disarankan : (1) Pemerintah Daerah sebaiknya meningkatkan sumber penerimaan dari pajak dan retribusi yang cukup potensial. Selain itu juga menggali potensi daerah untuk meningkatkan sumber pendapatan dari kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan sumber penerimaan dari daerahnya sendiri yakni PAD sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada transfer Pemerintah Pusat. Dan tetapi tidak hanya pajak daerah saja, sehingga masyarakat tidak terlalu terbebani oleh pajak, dan PAD yang dihasilkan mampu membiayai belanja daerah itu sendiri. (2) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan memasukkan aspek lain ke dalam penelitian seperti aspek kebijakan publik, luas wilayah, serta manajemen keuangan pemerintah daerah. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat memperluas sampel penelitian untuk seluruh Wilayah Indonesia dengan periode pengamatan yang lebih panjang. Dan juga memasukkan aspek perilaku Pemda dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki daerah, serta memperhatikan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kemudahan pada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"*Flypaper Effect* pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2013"**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan program studi S-1 dan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Nurzi Sebrina, SE, M.Sc, Ak selaku pembimbing I dan Ibu Salma Taqwa, SE, M.Si selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan transfer ilmu kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak dan Ibu Nayang Helmayunita, SE, M.Sc selaku penguji yang telah memberi banyak saran dan perbaikan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Prof. Dr. Yunia Wardi, Drs, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

4. Bapak Fefri Indra Arza, S.E, M.Sc, Ak dan Bapak Henri Agustin S.E, M.Sc, Ak selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
5. Bapak Fefri Indra Arza, S.E, M.Sc, Ak selaku dosen Penasehat Akademik (PA).
6. Staf dosen serta karyawan / karyawati Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Khususnya Program Studi Akuntansi serta karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di kampus ini serta yang telah mengarahkan dan membantu penulis dalam mendapatkan data selama penelitian ini.
7. Pegawai perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Ekonomi Universitas Negeri Padang
8. Teristimewa kepada papa Nuryadi, S.Pd, MM dan mama Rosmaini serta abang dr. Andria Prima Rosyadi dan keluarga besar yang telah memberikan perhatian, semangat, do'a, dorongan dan pengorbanan baik secara moril maupun materil hingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini.
9. Kepada maongah Dr. Idris, M.Si. dan amai Dra. Aryuliva Adnan, M.Pd. yang memberikan bantuan selama perkuliahan hingga saat ini
10. Teman-teman terSayang power ranger, Jivi Trima Putri,SE, Erina Juita,SE, Shafira Khairani,SE, Utari Resdina Syafri,SE yang sama-sama telah membantu dan berjuang bersama.
11. Sahabat TerCinta Afriace Dwi Rizki, ST yang selalu memberikan semangat serta motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi

12. Teman terKasih Tomi Pabrian Kusuma yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis
13. Teman-teman Sahidayu,SE, Intan Alvionita,SE , Vivi Yuliasari,SE, Wahyu Harja Saputra,SE, Edi yasmoro,SE , dan teman – teman ENOB yang sama-sama berjuang membantu, memotivasi, saran, dukungan, serta bimbingan yang sangat berguna dalam penulisan ini.
14. Semua sahabat seperjuangan di Prodi Akuntansi angkatan 2011 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang Serta semua pihak yang telah membantu dalam proses perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga bantuan, bimbingan dan petunjuk yang bapak/ibu dan rekan - rekan berikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Penulis telah menulis semaksimal mungkin untuk skripsi ini, namun apabila pembaca masih menemukan kekurangan, maka penulis memohon adanya saran dan kritikan.

Padang, 31 Januari 2016

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK.....i
KATA PENGANTAR.....ii
DAFTAR ISI.....v
DAFTAR TABEL.....viii
DAFTAR GAMBAR.....ix
DAFTAR LAMPIRAN.....x
BAB I PENDAHULUAN.....1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 10
BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS...11
A. Kajian Teori 11
1. Flypaper Effect **11**
2. Pendapatan Asli Daerah **13**
3. Dana Alokasi Umum **20**
4. Belanja Daerah **21**
B. Penelitian Terdahulu 24
C. Hubungan antar Variabel 26
D. Kerangka Konseptual 28
E. Hipotesis 28
BAB III METODE PENELITIAN.....30
A. Jenis Penelitian 30
B. Objek Penelitian 30

C. Populasi dan Sampel 30
a. Populasi 30
b. Sampel 31
D. **Jenis dan Sumber Data 32**
E. Teknik Pengupulan Data 32
F. Variabel Penelitian dan Pengukuran 32
1. Variabel Dependen 32
2. Variabel Independen 33
G. Teknik Analisis Data 33
1.Uji Asumsi Klasik 33
a.Uji Normalitas 33
b.Uji Multikolinearitas 34
c.Uji heterokedastisitas 34
2. Model Regresi Berganda 35
3. Uji Kelayakan Model 36
4. Uji Hipotesis 37
H. Definisi Operasional 38
1.Flypaper Effect 38
2.Belaja Daerah 38
3.Pendapatan Asli Daerah 38
4.Dana Alokasi Umum……39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN……..40
A. Gambaran Umum 40
B. Deskripsi Variabel Penelitian 41
1. Belanja Daerah 41
2. Pendapatan Asli Daerah 44
3. Dana Alokasi Umum 46
4. Flypaper Effect……48

C. Statistik Deskriptif 48
D. Analisis Induktif 50
1. Analisis Model Regresi Panel……..……50
a. Uji Normalitas Residual 55
b. Uji Autokorelasi 55
c. Uji Heteroskedatisitas 56
d. Uji Multikolinearitas 56
2. Model Regresi Panel..... 57
E. Uji Model 59
F. Pembahasan Hasil Uji Hipotesi 61
BAB **V KESIMPULAN DAN SARAN……..…..67**
A. Kesimpulan..... 67
B. Keterbatasan Penelitian 67
C. Saran 68
DAFTAR PUSTAKA……...…….……...70
LAMPIRAN…….……73

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel

Daftar Nama Kabupaten/Kota di Sumatera Barat 31
Penggunaan Belanja Daerah untuk kabupaten/kota dari tahun 2010-2013..... 42
Penghasilan PAD untuk kabupaten/kota dari tahun 2010-2013..... 44
Penerimaan DAU untuk kabupaten/kota dari tahun 2010-2013 47
Statistik Deskriptif 49
Hasil Uji Heteroskedastisitas..... 56
Hasil Uji Multikolinearitas 57

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Nama Gambar

Kerangka Konseptual..... 28

Hasil Uji Normalitas Residual 55

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Nama Lampiran

Tabulasi Data 73

Hasil Olahan Data 76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia mulai memasuki babak baru dalam kehidupan bermasyarakatnya. Otonomi daerah merupakan pelimpahan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada masing-masing daerah baik tingkat I maupun tingkat II untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari otonomi daerah menurut UU No 32 tahun 2004 adalah otonomi daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat secara nyata, dinamis, dan bertanggung jawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan di daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat local.

Pemerintah daerah juga berperan penting dalam pengelolaan kemajuan suatu daerah termasuk salah satunya mengenai penganggaran. Menurut Brojonegoro dan Vazquez (dalam Iskandar, 2012) sejak tahun anggaran 2001, pemerintah telah menerapkan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-undang tersebut membawa Indonesia memasuki era baru dalam desentralisasi di bidang fiskal (*fiscal decentralization* atau

fiscal federalism). Dampaknya terjadi perubahan struktural, di mana pada era sebelumnya pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara sentralistik kemudian berubah menjadi desentralisasi. Hal ini akan berwujud dalam bentuk pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk memungut pajak, dan adanya bantuan dalam bentuk transfer dari pemerintah pusat kepada daerah. Seiring dengan proses pembaruan terhadap isu otonomi dan desentralisasi, pemerintah telah melakukan revisi atas UU No. 25 Tahun1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah menjadi UU No. 33 Tahun 2004. Menurut undang-undang tersebut, sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Sumber pendanaan ini yang nantinya akan dipergunakan pemerintah untuk mendanai segala keperluan pemerintahan yang biasa disebut dengan belanja daerah.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan propinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Beberapa peneliti menemukan respon pemerintah daerah berbeda untuk transfer dan pendapatan

sendiri. Ketika penerimaan daerah berasal dari transfer, maka stimulasi atas belanja yang ditimbulkannya berbeda dengan stimulasi yang muncul dari pendapatan daerah (terutama pajak daerah). Menurut Deni Oktavia (2014) Setiap transfer tidak bersyarat yang diberikan kepada Pemerintah Daerah merupakan konsekuensi atas otonomi daerah yang berlaku agar tidak menyebabkan kesenjangan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Pajak daerah dapat digolongkan kedalam Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendanaan daerah yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan di tingkat daerah. Sumber dana utama pemerintah daerah berasal dari PAD yang dipakai untuk membiayai belanja daerah dan pembangunannya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah seperti pajak daerah dan retribusi daerah. Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hendaknya didukung upaya pemerintah daerah dengan meningkatkan kualitas layanan publik (Mardiasmo, 2002).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap daerah berbeda-beda. Daerah yang memiliki kemajuan dibidang industri dan memiliki kekayaan alam yang melimpah cenderung memiliki PAD jauh lebih besar dibanding daerah lainnya, begitu juga sebaliknya. Karena itu terjadi ketimpangan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Disatu sisi ada daerah yang sangat kaya karena memiliki PAD yang tinggi dan disisi lain ada daerah yang tertinggal karena memiliki PAD yang rendah. PAD dalam beberapa

penelitian yang telah dilakukan menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. Dalam penelitian Kusumadewi dan Rahman (2007) menyatakan bahwa PAD berpengaruh Signifikan terhadap Belanja Daerah, dan PAD ini sekaligus dapat menunjukan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak PAD yang didapat semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus tergantung pada pemerintah pusat, yang berarti ini menunjukan bahwa pemerintah daerah tersebut telah mampu untuk mandiri, dan begitu juga sebaliknya.

Selain PAD Pemerintah daerah mendapatkan bantuan transfer dana dari pemerintah pusat berupa Dana Perimbangan yang akan digunakan untuk keperluan belanja daerah. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Alokasi transfer di negara-negara sedang berkembang pada umumnya lebih banyak didasarkan pada aspek belanja tetapi kurang memperhatikan kemampuan pengumpulan pendapatan asli daerah. Akibatnya, dari tahun ke tahun pemerintah daerah selalu menuntut transfer yang lebih besar lagi dari pusat, bukannya mengeksplorasi basis pajak lokal secara lebih optimal (Oates, 1999 dalam Halim 2003). Keadaan tersebut juga ditemui pada kasus pemerintah daerah kota dan kabupaten di Indonesia (Kuncoro, 2007) terdapat DAU yang juga mempengaruhi Belanja Daerah yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2006

tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Dana Alokasi Umum merupakan dana hibah murni (*grants*) yang kewenangan penggunaanya diserahkan penuh kepada pemerintah daerah penerima. UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan pengertian bahwa DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerahnya.

Pemberian DAU lebih diprioritaskan pada daerah yang mempunyai kapasitas fiskal rendah dimana daerah tersebut belum mampu memaksimalkan pendapatan asli daerahnya dikarenakan suatu hal. Untuk daerah yang mempunyai kapasitas fiskal tinggi justru akan mendapat jumlah DAU yang lebih kecil, sehingga diharapkan dapat mengurangi ketidakseimbangan fiskal antardaerah dalam menjalani era otonomi sekarang. Selain itu pada saat transfer dana dari pemerintah pusat menurun maka juga diikuti oleh penurunan belanja daerah yang melebihi penurunan PAD.

Transfer DAU dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah di Indonesia yaitu ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Netto yang ditetapkan dalam APBN. Sehingga dalam prakteknya transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber dana utama pemerintah daerah untuk membiayai operasi

utamanya sehari-hari, yang oleh pemerintah daerah "dilaporkan" diperhitungan di APBD. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi (kalau tidak mungkin menghilangkan) kesenjangan fiskal. Pada saat DAU lebih di prioritaskan untuk belanja daerahnya dibandingkan pendapatan daerahnya sendiri berarti ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat masih tinggi. Kecenderungan inilah yang disebut dengan *flypaper effect.*

Flypaper effect adalah suatu fenomena pada suatu kondisi ketika Pemerintah Daerah merespon belanja daerahnya lebih banyak berasal dari transfer/*grants* atau spesifiknya pada transfer tidak bersyarat atau *unconditional grants* daripada pendapatan asli dari daerahnya tersebut sehingga akan mengakibatkan pemborosan dalam Belanja Daerah. *Unconditional grants* yang diproksikan dengan Dana Alokasi Umum ditentukan berdasarkan celah *fiscal*, yaitu kebutuhan fiskal dikurangi kemampuan fiskal daerah dan alokasi dasar yang dialokasikan secara keseluruhan (*lump sum*) dari pemerintah pusat (Deni Oktavia 2014). Karena itu *flypaper effect* dianggap sebagai suatu anomali dalam prilaku rasional jika transfer harus dianggap sebagai tambahan pendapatan masyarakat (seperti halnya pajak daerah), sehingga harus dibelanjakan dengan cara yang sama pula dengan pendapatan asli daerah.

DAU diprioritaskan penggunaannya untuk mendanai gaji dan tunjangan pegawai, kesejahteraan pegawai, kegiatan operasi dan pemeliharaan serta pembangunan fisik sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum yang dibutuhkan masyarakat. Dalam penelitian Kusumadewi

dan Rahman (2007) menyatakan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Semakin besar dana transfer (DAU) yang diberikan pemerintah pusat ke pemerintah daerah, maka tingkat ketergantungan pemerintah daerah dalam membiayai belanja daerah juga akan semakin tinggi untuk melaksanakan program dan kegiatan yang ada di daerah. Disatu sisi jika DAU yang diberikan pemerintah pusat besar maka akan membuat pemerintah daerah bergantung lebih terhadap pemerintah pusat.

Daerah yang mempunyai kemampuan fiskal rendah akan mendapatkan DAU dalam jumlah yang relatif besar, sebaliknya daerah yang mempunyai kemampuan fiskal tinggi akan mendapatkan DAU dalam jumlah yang kecil. Pemberian DAU diharapkan mampu mengalokasikan sumber dana ini pada sektor-sektor produktif sehingga dapat mendorong peningkatan investasi di daerah dan juga pada sektor yang berdampak pada peningkatan pelayanan publik serta dapat meningkatkan kontribusi publik terhadap PAD. Hal ini diharapkan agar kemandirian daerah menjadi semakin tinggi seiring dengan meningkatnya kapasitas fiskal daerah, yang menyebabkan tanggungan pemerintah untuk memberikan DAU bisa lebih dikurangi. Permasalahan yang terjadi saat ini adalah pemerintah daerah terlalu menggantungkan alokasi DAU untuk membiayai belanja daerah dan pembangunan tanpa mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh daerah.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Bambang Agus Pramuka (2010) membuktikan bahwa hasil analisis data dan pembahasan hasil yang telah dijabarkan,

maka hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara simultan maupun secara parsial DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Selanjutnya juga terbukti bahwa *flypaper effect* tidak terjadi pada Kabupaten dan Kota di Jawa; akan tetapi PAD dan DAU terbukti cenderung menyebabkan peningkatan jumlah Belanja Daerah di tahun berikutnya. Hal ini bertentangan dengan penelitian Indhi Hastuti (2011) Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Pendapatan Asli Daerah mempunyai hubungan yang tidak signifikan dalam efisien Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota dan Kabupaten Semarang. Setiap SKPD yang memiliki PAD rendah maka pengeluaran untuk kinerja SKPD daerahnya tetap tinggi, karena untuk pembiayaan output dari SKPD tersebut menggunakan dana transfer dari pemerintah pusat. Dan berdasarkan hasil penelitian tersebut diperoleh bukti bahwa dalam laporan keuangan Kota Semarang terjadi *Flypaper Effect*.

Karena itulah peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh sebenarnya DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah dan apakah terjadi *Flypaper Effect* pada belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumbar. Dua hal yang dapat terjadi pada penelitian ini adalah terjadi atau tidaknya *flypaper effect* pada pengaruh DAU dan PAD terhadap belanja daerah. Jika penelitian ini mengindikasikan telah terjadi *flypaper effect* pada belanja daerahnya, maka pemerintah daerah diharapkan untuk meninjau ulang kebijakan yang telah diterapkan agar dapat mengeksplor secara maksimal pendapatan yang bersumber dari daerah sebagai bentuk kemandirian dari daerah tersebut. Oleh karena itu peneliti berkeyakinan bahwa apabila hal ini tidak

diteliti maka akan terjadi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat yang mengharapkan transfer dari pusat ke daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **"*Flypaper Effect* pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumbar"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Sejauhmana Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumbar?
2. Sejauhmana Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumbar?
3. Apakah terjadi *Flypaper Effect* pada PAD dan DAU terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumbar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris tentang:

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumbar
2. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumbar.

3. Kemungkinan terjadinya *Flypaper Effect* pada pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumbar.

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini berguna karena peneliti dapat mengetahui bahwa baik dalam anggaran dan realisasi anggaran terdapat sebuah perbedaan yang terjadi dalam penyusunan keuangan pemerintah daerah.
2. Penelitian ini berguna bagi dunia pendidikan khususnya Mahasisiwa Akuntansi untuk memberi kontribusi teori sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi peneliti-peneliti lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini.
3. Penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan masukan bagi Pemerintah dalam hal penyusunan kebijakan di masa yang akan datang yang berkaitan dengan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi dari APBN dan APBD, serta UU dan PP yang menyertainya.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Flypaper Effect

a. Pengertian

Istilah *Flypaper Effect* diperkenalkan pertama kali oleh Courant, Gramlich, dan Rubinfeld (1979) untuk mengartikulasikan pemikiran Arthur Okun (1930) dalam Deni Oktavia (2013) yang menyatakan "money sticks where it hits". *Flypaper Effect* adalah suatu fenomena pada suatu kondisi ketika Pemerintah Daerah merespon belanja daerahnya lebih banyak berasal dari transfer/grants atau spesifiknya pada transfer tidak bersyarat atau unconditional grants daripada pendapatan asli dari daerahnya tersebut sehingga akan mengakibatkan pemborosan dalam Belanja Daerah. *Flypaper effect* atau lebih dikenal dengan efek kertas layang adalah suatu kondisi yang terjadi saat pemerintah daerah merespon (belanja) lebih banyak dengan menggunakan dana transfer *(grants*) yang diproksikan dengan DAU dari pada menggunakan kemampuan sendiri, diproksikan dengan PAD (Maimunah, 2006). Karena itu *flypaper effect* dianggap sebagai suatu anomali dalam prilaku rasional jika transfer harus dianggap sebagai tambahan pendapatan masyarakat (seperti halnya pajak daerah), sehingga harus dibelanjakan dengan cara yang sama pula dengan pendapatan asli daerah. Fenomena *flypaper effect* membawa implikasi lebih luas

bahwa transfer akan meningkatkan belanja pemerintah daerah lebih besar daripada penerimaan transfer itu sendiri. Anomali yang timbul tersebut menghasilkan dua aliran pemikiran dari para pengamat ekonomi mengenai telaah *flypaper effect*, yakni Model Birokratik (*bureaucratic model*) dan Model Ilusi Fiskal (*fiscal illusion model*).

Fenomena *flypaper effect* dapat terjadi dalam dua versi (Gorodnichenko, 2001) dalam Deni Oktavia (2013). Pertama merujuk pada peningkatan pajak daerah dan anggaran pengeluaran pemerintah yang berlebihan. Kedua mengarah pada elastisitas pengeluaran terhadap transfer yang lebih tinggi daripada elastisitas pengeluaran terhadap penerimaan pajak daerah. Oates (1979) dalam Haryo Kuncuro (2007) menyatakan fenomena *flypaper effect* dapat dijelaskan dengan ilusi fiskal. Bagi Oates, transfer akan menurunkan biaya rata-rata penyediaan barang publik (bukan biaya marginalnya). Namun, masyarakat tidak memahami penurunan biaya yang terjadi adalah pada biaya rata-rata atau biaya marginalnya. Masyarakat hanya percaya harga barang publik akan menurun. Bila permintaan barang publik tidak elastis, maka transfer berakibat pada kenaikan pajak bagi masyarakat. Ini berarti *flypaper effect* merupakan akibat dari ketidaktahuan masyarakat akan anggaran pemerintah daerah

b. Pengukuran

Untuk menganalisis fenomena *flypaper effect* dapat dilihat dari hasil regresi berganda yang membandingkan koefisien PAD dan DAU, model regresi berganda

sebagai berikut:

BDi = a + b1 PAD 1i + b2 DAU 2i + e

Fenomena *flypaper effect* terjadi apabila koefisien DAU lebih besar daripada koefisien PAD , atau PAD yang tidak signifikan.

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Pengertianm PAD

Menurut Ahmad Yani (2008) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daearah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. Dan Pendapatan Asli Daerah ini sekaligus dapat menujukan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak

Pendaptan Asli Daerah yang didapat semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus tergantung pada Pemerintah pusat, yang berarti ini menunjukan bahwa Pemerintah daerah tersebut telah mampu untuk mandiri, dan begitu juga sebaliknya.

Menurut Abdul Halim (2004), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

b. Jenis-jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Abdul Halim (2007), kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu:

1. Pajak Daerah
   a) Pajak Provinsi
   b) Pajak Kabupaten/ Kota
2. Retribusi Daerah, terdiri dari: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perijinan Tertentu.
3. Hasil Perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah, yaitu: Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah.

c. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah

1) Pajak Daerah

Menurut Kesit Bambang Prakosa (2004), Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2) Jenis- jenis Pajak Daerah

Pajak Daerah menurut Kesit Bambang Prakosa (2004) dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Pajak Propinsi, terdiri dari:
   a) Pajak Kendaran Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
   b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
   c) Pajak Bahan Bakar Kendaran Bermotor.

d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air di Bawah Tanah dan Air Permukaan.

2. Pajak Kabupaten/ Kota, terdiri dari:
   a) Pajak Hotel
   b) Pajak Restoran
   c) Pajak Hiburan
   d) Pajak Reklame
   e) Pajak Penerangan Jalan
   f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
   g) Pajak Parkir

Sedangkan jenis-jenis pajak daerah Kabupaten/ Kota menurut Undang-undang nomor 28 tahun 2009 antara lain:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

d. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Retribusi Daerah

1) Retribusi Daerah

Menurut Ahmad Yani (2008) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi daerah, sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

2) Jenis Retribusi

Menurut Ahmad Yani (2008) tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan social ekonomi layak dijadikan objek retribusi. Jasa tersebut dikelompokkan kedalam tiga golongan, yaitu:

a) Jasa Umum

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
4. RetribusiPelayanan Pemakaman
5. Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum
6. Retribusi Pelayanan Pasar
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
10. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan

b) Retribusi Jasa Usaha

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2. Retribusi Pasar Grosir atau Pertokoan
3. Retribusi Tempat Pelelangan
4. Retribusi Terminal
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir
6. Retribusi Tempat Penginapan
7. Retribusi Penyedotan Kakus
8. Retribusi Rumah Potong Hewan
9. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal
10. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
11. Retribusi Penyeberangan di Atas Air
12. Retribusi Pengelolaan Limbah Cair

13. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

c) Retribusi Perizinan Tertentu

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
2. Retribusi Izin tempat Penjualan Minuman Beralkohol
3. Retribusi Izin Gangguan
4. Retribusi Izin Trayek

e. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil yang diperoleh dari pengelolaan APBD. Jika atas pengelolaan tersebut memperoleh laba, laba tersebut dapat dimasukkan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini mencakup:

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
2. Bagian Laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/ Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
3. Bagian Laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

f. Kontribusi Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis-jenis lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari:

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
2. Jasa giro
3. Pendapatan bunga
4. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
5. Penerimaan komisi
6. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
7. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
8. Pendapatan denda pajak
9. Pendapatan denda retribusi

3. Dana Alokasi Umum (DAU)

a. Pengertian

Menurut Ahmad Yani (2008) Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksaan desentralisasi. DAU dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota. Namun demikian, daerah kabupaten/kota yang ada diwilayah Provinsi DKI Jakarta tidak menerima DAU karena otonomi Provinsi DKI Jakarta diletakkan pada lingkup Provinsi sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Dana Alokasi Umum (DAU) menurut UU No.25 Tahun 1999 berasal dari APBN dan dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi, yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antardaerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.

4. Belanja Daerah

a. Pengertian

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 14, Belanja Daerah (BD) adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pengeluaran belanja berbeda dengan pengeluaran pembiayaan. Perbedaan tersebut terletak pada ada atau tidaknya pengembalian dana yang telah dikeluarkan. Pemerintah daerah tidak akan mendapatkan pembayaran kembali atas pengeluaran belanja yang terjadi, baik pada tahun anggaran berjalan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan merupakan pengeluaran yang akan diterima kembali pembayarannya pada tahun anggaran berjalan atau pada tahun anggaran berikutnya (Pramuka B.A, 2010).

Menurut Kusumadewi Dan Rahman (2007) Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah yang menjadi beban daerah dalam satu periode anggaran.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, struktur Belanja Daerah yang digunakan dalam APBD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu: Belanja Operasi (BO); Belanja Modal (BM), dan Belanja Tidak Terduga. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Belanja operasi terdiri dari: Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Belanja modal merupakan pengeluaran yang dianggarkan untuk pembelian atau pengadaan aset tetap dan aset lainnya untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan yang memiliki kriteria sebagai berikut: masa manfaatnya lebih dari 12 bulan, merupakan objek pemeliharaan, jumlah nilai rupiahnya material sesuai dengan kebijakan akuntansi. Belanja modal terdiri dari belanja tanah; belanja peralatan dan mesin; belanja gedung dan bangunan; belanja jalan, irigasi dan jaringan; belanja aset tetap dan lainnya; dan belanja aset lainnya. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah. Belanja tidak terduga antara lain meliputi belanja penanganan bencana dan belanja pelaksanaan kewenangan.

Menurut Rofiq (2007) dalam (tampubolon 2011), “Belanja Daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi,

khususnya dalam pemberian pelayanan umum". Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan propinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Menurut Afiah (2009) dalam Tampubolon (2011), Belanja daerah adalah "kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih". Belanja daerah, meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah meliputi: Belanja Langsung, yaitu belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program; Belanja Tidak Langsung, yaitu belanja tugas pokok dan fungsi yang tidak dikaitkan dengan pelaksanaan program.

Pada dasarnya pemerintahan daerah memiliki peranan yang penting dalam pemberian pelayanan publik. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa permintaan terhadap pelayanan publik dapat berbeda-beda antar daerah. Sementara itu, Pemerintah Daerah juga memiliki kedudukan yang paling dekat dengan publik untuk mengetahui dan mengatasi perbedaan-perbedaan dalam permintaan dan kebutuhan pelayanan publik tersebut. Satu hal yang menjadi sangat penting adalah bagaimana memutuskan untuk mendelegasikan tanggung jawab pelayanan publik atau fungsi

belanja pada berbagai tingkat pemerintahan. Menurut Tampubolon (2011), Secara teoritis terdapat dua pendekatan yang berbeda dalam pendelegasian fungsi belanja, yaitu pendekatan "pengeluaran" dan pendekatan "pendapatan". Menurut pendekatan "pengeluaran", kewenangan sebagai tanggung jawab antar tingkat pemerintahan dirancang sedemikian rupa agar tidak saling timpang tindih. Pendelegasian ditentukan berdasarkan kriteria yang bersifat obyektif, seperti tingkat lokalitas dampak dari fungsi tertentu, pertimbangan keseragaman kebijakan dan penyelenggaraan, kemampuan teknik dan manajerial pada umumnya, pertimbangan faktor-faktor luar yang berkaitan dengan kewilayahan, efisiensi dan skala ekonomi. Sedangkan menurut pendekatan "pendapatan", sumber pendapatan publik dialokasikan antar berbagai tingkat pemerintah yang merupakan hasil dari tawar-menawar politik.

B. Penelitian Terdahulu

1. Mutiara Maimunah (2006) mengenai *Flypaper Effect* Pada Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatera dan dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini PAD dan DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah dan hal tersebut membuktikan bahwa telah terjadi *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatera.
2. Indhi Hastuti (2010) mengenai Analisis *Flypaper Effect* Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hasil dari penelitian ini diperoleh bukti bahwa dalam laporan

keuangan Kota Semarang terjadi *Flypaper Effect*. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) selalu mengalami peningkatan

3. Diah Ayu Kusumadewi dan Arief Rahman (2007) mengenai *Flypaper Effect* Pada Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Indonesia. Hasil statistik variabel independen yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan variabel dependen yaitu Belanja Daerah. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa PAD dan DAU secara bersamasama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah. pengaruh DAU terhadap belanja daerah lebih kuat daripada pengaruh PAD terhadap belanja daerah. Atau dengan kata lain membuktikan adanya *flypaper effect* dalam respon Pemda terhadap DAU dan PAD.
4. Gregorius N. Masdjojo dan Sukartono (2009) mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Serta Analisis *Flypaper Effect* Kabupaten / Kota Di Jawa Tengah Tahun. Variabel Independen yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan, dan variabel dependen yaitu Belanja Daerah. Hipotesis PAD, DAU, DBH berpengaruh positif terhadap BD diterima secara signifikan, Hipotesis BD pada kabupaten / kota di Jawa Tengah mengalami flypaper effect terbukti atau diterima, respon BD masih lebih besar disebabkan oleh DP khususnya yang berasal dari komponen DAU.

C. Hubungan Antar Variabel.

a. PAD terhadap belanja daerah

Dalam UU no 32 tahun 2004 Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerahnya sendiri sangat tergantung pada kemampuan untuk mengubah potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan yang diwujudkan dalam pendapatan asli daerah. Pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Pengeluaran daerah dapat berupa belanja daerah maupun pengeluaran pembiayaan. UU Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Daerah membagi belanja menurut kelompok belanja menjadi dua jenis, yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah, pemerintah daerah melakukan pengeluaran-pengeluaran yang tercermin dalam belanja daerah. Peningkatan PAD akan meningkatkan pendapatan daerah. peningkatan dalam pendapatan daerah akan memicu peningkatan belanja daerah. Dalam hal ini pengeluaran pemerintah daerah akan disesuaikan dengan perubahan dalam penerimaan pemerintah daerah atau perubahan pendapatan terjadi sebelum perubahan pengeluaran.

Pernyataan ini di dukung oleh penelitian Hadi Sasana (2010) bahwa pengaruh PAD terhadap belanja daerah adalah positif dan signifikan secara statistik. Jadi, jika PAD meningkat akan memicu peningkatan belanja daerah.

b. DAU terhadap belanja daerah

Menurut UU No. 25 Tahun 1999, alokasi DAU ke suatu daerah ditetapkan berdasarkan dua faktor, yaitu potensi perekonomian dan kebutuhan daerah. Kebutuhan daerah (fiscal need) dicerminkan oleh jumlah penduduk, luas wilayah, keadaan geografis, dan tingkat pendapatan masyarakat. Potensi perekonomian antara lain dicerminkan oleh potensi penerimaan pemerintah daerah (fiscal capacity), seperti dari hasil industri dan sumber daya alam.

Pemerintah pusat mengharapkan dengan adanya desentralisasi fiskal pemerintah daerah lebih mengoptimalkan kemampuannya dalam mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga tidak hanya mengandalkan DAU. Dengan adanya transfer DAU dari Pemerintah Pusat maka daerah bisa lebih fokus untuk menggunakan PAD yang dimilikinya untuk membiayai belanja modal yang menunjang tujuan pemerintah yaitu meningkatkan pelayanan public dan memperbaiki kinerja agar lebih baik.

Pernyataan ini didukung oleh penelitian Hadi Sasana (2010) yang menyatakan bahwa hubungan DAU terhadap belanja daerah adalah positif dan signifikan. Jadi hal ini dapat dikatakan bahwa jika DAU meningkat, maka belanja derah juga meningkat.

D. Kerangka Konseptual

Belanja daerah merupakan semua pengeluaran daerah untuk membiayai keperluan daerah. Dalam membiayai keperluan belanja suatu daerah biasanya berasal dari PAD dan DAU. Ada daerah yang fokus mengandalkan pendapatan daerahnya ada pula daerah yang mengandalkan hibah dari pemerintah pusat. Jika pengaruh DAU lebih besar terhadap belanja daerah dari pada pengaruh PAD terhadap belanja daerah maka akan terjadi *flypaper effect.*

Untuk lebih jelas kaitan antara variabel-variabel dalam penelitian ini dapat digambarkan kerangka konseptual sebagai berikut:

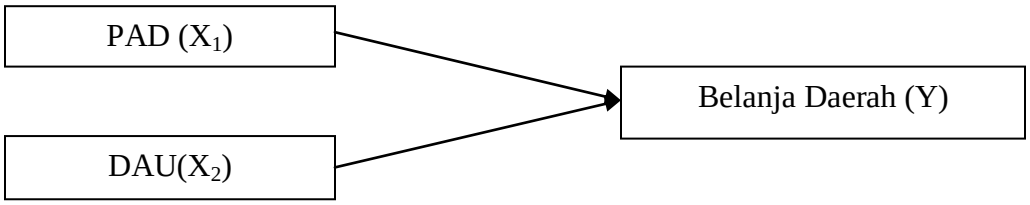

Gambar 1. Kerangka Konseptual

E. Hipotesis

Berdasarkan kajian teori dan kerangka konseptual di atas, maka dapat dihasilkan hipotesis sebagai berikut :

H_1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah

H_2 : Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pengujian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah (BD), hal ini bermakna bahwa semakin besar PAD maka semakin besar pula BD.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah (BD), hal ini bermakna bahwa semakin besar DAU maka semakin besar pula BD.
3. Telah terjadi *flypaper effect* terhadap belanja daerah, hal ini bermakna bahwa belanja daerah tersebut masih diprioritas oleh DAU dibandingkan dengan pendapatan sendiri (PAD)

B. Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui laporan APBD yang dipublikasikan oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah tahun 2010-2013, sehingga aspek-aspek perilaku pemerintah daerah tidak ikut dilibatkan dalam mengalokasikan sumber daya, menentukan kebijakan belanja, efektifitas penyerapan PAD dan efisiensi dalam penggunaan pendapatan daerah seperti PAD maupun DAU untuk Belanja Daerah.

2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang ada di Situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah tidak lengkap di upload, yang diharapkan LRA tahun 2014 keluar tetapi tidak tersedia.

C. **Saran**

Dari kesimpulan yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini, maka dapat diberi beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah sebaiknya meningkatkan sumber penerimaan dari pajak dan retribusi yang cukup potensial. Selain itu juga menggali potensi daerah untuk meningkatkan sumber pendapatan dari kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan sumber penerimaan dari daerahnya sendiri yakni PAD sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada transfer Pemerintah Pusat. Tetapi untuk meningkatkan PAD tidak hanya pajak daerah saja yang lebih dibebankan, sehingga masyarakat tidak terlalu terbebani oleh pajak, dan PAD yang dihasilkan mampu membiayai belanja daerah itu sendiri.
2. Saran bagi peneliti selanjutnya diharapkan memasukkan aspek lain ke dalam penelitian seperti aspek kebijakan publik, luas wilayah, serta manajemen keuangan pemerintah daerah. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat memperluas sampel penelitian untuk seluruh Wilayah Indonesia dengan periode pengamatan yang lebih panjang. Dan juga memasukkan aspek perilaku Pemda dalam mengalokasikan sumber daya

3. yang dimiliki daerah, serta memperhatikan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

DAFTARPUSTAKA

Abdullah, Syukriy.,dan Abdul Halim. 2003. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah*. Simposium Nasional Akuntansi VI

Ahmad Yani. 2008. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia.* Ed Revisi. Perpustakaan Nasional

DeniOktavia. 2014. *Flypaper Effect: Fenomena Serial Waktu Dan Lintas Kabupaten Kota Di JawaTimur* .Universitas Jember

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. 2009. Laporan Realisasi Anggaran. www.djpk.depkeu.go.id. Di akses 9 November 2015

FitriAmalia. 2015. *Analisis Flypaper Effect Pada Belanja Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Banten.*UIN Syarif Hidayatullah :Jakarta

Ghozali, Imam, 2009. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS, Edisi Keempat, Penerbit Universitas Diponegoro.

Gregorius N. Masdjojo dan Sukartono . 2009 .*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Serta Analisis Flypaper Effect* Kabupaten / Kota Di Jawa Tengah. UnivStikubank

Hadi Sasana.2010. *Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah pada Provinsi Di Indonesia*. UNDIP

Halim, Abdul. 2002. Seri Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah, Jakarta: Salemba Empat.

Indhi Hastuti .2011. *Analisis Flypaper Effect Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)*. UNDIP

Iskandar, I. 2012. *Flypaper Effect* pada *Uncoditional Grants*. Jurnal Ekonomi Pembangunan

Kuncoro. 2007. *Fenomena Flypaper Effect pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi X Makassar.

Kusumadewi, DiahAyu, dan A. Rahman. 2007. *Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten /Kota di Indonesia*. JAAI,

Leonard P Tampubolon. 2011. *Fenomena Flypaper Effect pada Belanja Daerah Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Propinsi Riau*. Usu

Maimunah, Mutiara. 2006. *Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatra*. Simposium Nasional Akuntansi 9.

Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Kekayaan Daerah*

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2006 tentang *Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten /Kota.*

Pipit Budiarti . 2014. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Struktur Belanja Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten /Kota di Jawa Timur.* FE Brawijaya

Prakosa, KesitBambang, 2004. *Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan PAD terhadap Prediksi Belanja Daerah*(StudiEmpiris di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY)

Pramuka, Bambang Agus. 2010. *Flypaper Effect Pada Pengeluaran Pemerintah Daerah Di Jawa*. Jurnal Ekonomi Pembangunan.

Rini Nurdini, dkk. 2014. *Analisis Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah (BD) Kabupaten/Kota Di Jawa Barat.* JAKA

Sekaran. U. 2006. *Research Methods for Bussiness*. Buku 2.Edisi 4.Salemba Empat. Jakarta.

Sri Puji Paujiah. 2013. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Tasikmalaya).* FE UNIV Siliwangi

Sukriy, Abdullah.,&Halim, Abdul. 2004. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah Studi kasus Kabupaten/Kota di Jawadan Bali*. Yogyakarta: Jurnal Ekonomi STEI

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang *Pemerintahan Daerah. Sekretariat Negara Republik Indonesia.*

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sekretariat Negara Republik Indonesia.*

Wing WahyuWinarno. 2009. *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews.* Yogyakarta: UPP STIM YKPN

Yuriko Ferdian. 2013. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Belanja Daerah.* UNP